

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK  
PUTUS SEKOLAH DI DESA LARANGAN LUAR KECAMATAN  
LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN TEORI  
FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOT PARSON**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S. Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:**

**LAYYINATUL MUNAWARAH  
NIM. I03214005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
JANUARI 2018**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Layyinatul Munawarah  
NIM : I03214005  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan teori fungsionalisme structural Talcot Parson

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Januari 2018

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a blue and white 'METERAI TEMPEL' (stamp) from the Indonesian government. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'KEMENTERIAN KEHUTANAN', 'AC464ABE174124946', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The value '6000' is printed in large red numbers at the bottom of the stamp.

**Layyinatul Munawarah**

NIM: I03214005

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Layyinatul Munawarah dengan judul: “**Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Januari 2018.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Hj. Rr Suhartini, M.Si  
NIP. 195801131982032001

Penguji II

Amal Taufiq, M.Si  
NIP. 197008021997021001

Penguji III

Husnul Muttaqih, S.Sos, M.S.I  
NIP. 197801202006041003

Penguji IV

Noor Rohman, MA  
NIP. 198510192015031001

Surabaya, 02 Februari 2018

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.  
NIP. 197402091998031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Layyinatul Munawarah

NIM : I03214005

Program Studi : Sosiologi

yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan teori fungsionalisme structural Talcot Parson”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 19 Januari 2018

Pembimbing



Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si  
NIP: 195801131982032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Layyinatul Munawarah  
NIM : I03214005  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi  
E-mail address : yeyenz1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus sekolah di Desa Larangan Luar  
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural  
Talcot Parson

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2018

Penulis

(Layyinatul Munawarah)





**BAB IV : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA LARANGAN LUAR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOT PARSON**

|  |    |
|--|----|
| A. Profil desa Larangan Luar.....  | 53 |
| B. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....   | 71 |
| C. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan teori Fungsionalisme structural Talcot Parson ..... | 87 |

**BAB V : PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 99  |
| B. Saran.....      | 101 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumen lain yang relevan
3. Jadwal Penelitian
4. Surat Keterangan (Fakultas dan tempat penelitian)
5. Biodata Peneliti







agar dapat menjadi insan-insan pembangunan yang profesional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, cerdas dan terampil serta memiliki semangat kerja keras yang tinggi agar mampu bersaing dalam dunia global untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan harus dipenuhi agar setiap individu memiliki bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai dalam kehidupannya. Pendidikan ini dapat diperoleh melalui proses belajar, baik di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Belajar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik. Sehingga pendidikan menjadi kunci dan elemen penting bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang, sebab melalui pendidikan diharapkan setiap individu dapat meningkatkan kualitas keberadaannya dan mampu beradaptasi dalam gerak pembangunan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mempersiapkan dunia esok yang lebih baik. Kualitas pendidikan, relevansi, pemerataan dan efektifitas pendidikan sebagai tuntutan nasional yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat berimplikasi nyata pada sistem pendidikan, program pendidikan dan kurikulum pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan dapat tercapai dengan baik jika programnya didesain secara jelas dan aplikatif.

Pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan khususnya pada aspek pemerataan, dalam perkembangannya secara empiris masih mengalami masalah-masalah yang menghambat tercapainya tujuan program pendidikan nasional.

Problematika pendidikan ini sudah menjadi masalah akut yang saling mempengaruhi antara kualitas SDM, mutu pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Disamping masalah kualitas program pendidikan yang berpotensi pada peningkatan kualitas *output* pendidikan/SDM, dunia pendidikan Indonesia juga mengalami masalah pada aspek pemerataan dan relevansi pendidikan.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Dunia pendidikan terus dihadapkan pada problematika ini dan membutuhkan kepedulian, tanggung jawab serta cara-cara yang strategis untuk mengatasinya. Peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan institusi pendidikan merupakan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan demi tercapainya program-program pemerintah dalam tujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Melalui pendidikan dapat dikembangkan keterampilan yang produktif bagi insan guna mempertahankan kehidupannya baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu anak-anak putus sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengingat anak-anak putus sekolah merupakan bagian integral dari generasi penerus bangsa. Kesuksesan suatu bangsa baik masa sekarang maupun masa mendatang sangat ditentukan oleh generasi penerus bangsa yang berpendidikan, memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan diri untuk membangun bangsa dan negara.

Permasalahan dan penanggulangan anak-anak putus sekolah merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu solusi untuk

membentuk, membangun dan mengarahkan mereka agar memiliki keperibadian yang kuat, cerdas dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia yang memang bila ditelaah lebih mendalam bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jadi bagaimana sekarang sikap pemerintah dan masyarakat harus dapat menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenjam pendidikan formal akan dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Dampak kemiskinan itu terjadi karena daya nalar orang dan mental orang yang tidak berpendidikan sangatlah berbeda dengan orang yang berpendidikan.

Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada ditangan anak-anak dimasa sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh haknya dimasa sekarang. Misalnya tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan bagian

dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. Pada kenyataan dimasyarakat tidak semua kebutuhan untuk anak terpenuhi. Salah satunya dibidang pendidikan. Didalam pendidikan Terdapat banyak anak putus Sekolah (formal). Keadaan lingkungan yang kurang mendukung, ekonomi, geografi, sosial ekonomi menjadi faktor penyebab anak putus Sekolah. Putus Sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan.

Jika diperhatikan dan diamati permasalahan tersebut, mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau yang putus Sekolah seperti diantaranya kesulitan ekenomi keluarga, keadaan rumah tangga yang tidak berjalan baik, permasalahan lingkungan yang mendorong anak untuk tidak bersemangat dalam mengikuti pendidikan, dan kurangnya dorongan yang terdapat pada diri anak untuk bersekolah, dan faktor yang paling penting yang datang dari institusi terkait, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dalam pembuatan program dan pengelolaan pendidikannya masih belum menunjukkan kualitas yang membanggakan, sehingga masih belum tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendidikan bagi anak-anak putus Sekolah, serta hal-hal lain yang ikut berpengaruh, seperti penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan di daerah terpencil



bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat.

Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus Sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program ini untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus Sekolah tetap masih ada.

Kabupaten Pamekasan, Madura, sudah lama mencanangkan sebagai Kota Pendidikan.. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini Membuat DPRD setempat meminta Dinas Pendidikan (Disdik) menekan siswa putus Sekolah. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan siswa lulusan SMP dan MTs ternyata masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikan di lembaga formal. Padahal pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Pamekasan menyandang Kota Pendidikan di Madura, sudah sewajarnya tidak ada lagi siswa atau anak yang











2.) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik; 3.) apparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4.) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud oleh penenliti adalah pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pmerintahan dalam bidang ini adalah Dinas pendidikan kabupaten pamekasan selaku pemilik otoritas dalam bidang pendidikan di kabupaten pamekasan.

### 3. Anak

Anak Artinya orang atau binatang yang baru di tetaskan. Anak adalah turunan kedua sesudah orang yang dilahirkan.<sup>9</sup>

Menurut UU RI nomor 23 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.

---

<sup>8</sup> Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),16.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 8 Oktober 2017, <http://kbbi.web.id/anak>.



relevan dengan penelitian Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

3. Bab III : Metode Penelitian

Peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

4. Bab IV: Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson

peneliti menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini di tinjau dari Teori yang digunakan peneliti. Selain itu, Peneliti memberikan juga memberi gambaran tentang data-data yang di peroleh, laporan hasil pengamatan, profil masyarakat, kehidupan sosial masyarakat yang berada di lokasi penelitian, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus Sekolah. Penyajian data dapat berupa tertulis atau dapat juga di sertakan gambar. Sedangkan analisis data dapat di gambarkan berbagai macam data-data yang kemudian di tulis dalam analisis deskriptif.







Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus Sekolah seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk Mitra Warga. Untuk strategi transformasi memberikan fasilitas program non formal seperti PKBM, Kejar Paket.

**Persamaan:** persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus Sekolah.

**Perbedaan:** perbedaan tersebut terletak dalam ruang lingkup kajian penelitiannya. Dimana kalau penelitian ini terletak di Kota Surabaya yang memang terkenal telah maju dan metropolis, sedangkan penelitian saya hanya pada lingkup pedesaan saja yang mana saat ini khususnya dalam penetapan kebijakan pendidikan lebih banyak menguntungkan pada daerah perkotaan saja. Anak yang putus Sekolahpun seringkali lebih banyak di daerah pedesaan di bandingkan dengan perkotaan yang salah satu faktornya karena tingkat kesadaran masyarakat Desa yang masih minim khususnya dalam hal pendidikan. Selain itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah pemerintah daerah desa Larangan Luar ini terutama Kabupaten pamekasan melakukan kebijakan penanganan anak sekolah,

agar citra pamekasan yang telah dinobatkan sebagai kota pendidikan dapat dipertahankan dengan baik.

2. Tesis berjudul “Perencanaan Penanggulangan Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Agam Sumatera” yang disusun oleh Jeki . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pendapatan perbulan dari pekerjaan utama orang tua, usia kawin ibu, dan keikutsertaan orang tua dalam KB memperlihatkan hasil yang signifikan. Dari analisis peramalan didapat 11 tahun dari tahun 2005 Kabupaten Agam tidak akan ada lagi siswa yang putus Sekolah dimana dapat dicapai dengan 3 skenario yaitu moderat, pesimis dan optimis. Oleh sebab itu upaya pemerintah untuk mengatasi siswa putus Sekolah pada tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun, antara lain dengan mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan dasar, memberikan beasiswa dan mengawasi pelaksanaan biaya operasional Sekolah (BOS).

**Persamaan:** persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam hal objek kajiannya, sama-sama untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus Sekolah berupa beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah.

**Perbedaan:** perbedaan tersebut terletak dalam kajian penelitiannya.

Dimana kalau penelitian ini terletak lebih menitikberatkan pada faktor penyebab anak putus Sekolah sehingga bisa dilakukan berbagai perencanaan penanggulangan anak miskin berdasarkan faktor penyebab anak putus Sekolah tersebut. Sedangkan penelitian saya bukan hanya pada faktor dan perencanaannya, melainkan bagaimanakah pemerintah dan juga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengentasan ini sehingga anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar ini dapat diminimalisir.

3. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Anak Putus Sekolah Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan (Suatu Kajian Terhadap Faktor-Faktor Geografis Dan Sosial Ekonomi)” yang disusun Agoes Soebijanto pada tahun 2008. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan jarak (faktor geografis), hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana  $X^2$  hitung  $29,954 > 28,869$   $X^2$  tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,721, terdapat hubungan yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan pendidikan orang tua hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana  $X^2$  hitung  $26,630 > 9,488$   $X^2$  tabel pada dk 4 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,698, terdapat hubungan yang signifikan antara anak

putus Sekolah dengan pekerjaan orang tua hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana  $X^2$  hitung  $26,846 > 12,592$   $X^2$  tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,700, terdapat hubungan yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan pendapatan orang tua hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana  $X^2$  hitung  $27,442 > 15,507$   $X^2$  tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,704 dan terdapat hubungan yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan jumlah beban tanggungan keluarga hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana  $X^2$  hitung  $26,057 > 18,307$   $X^2$  tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,694 (faktor sosial ekonomi).

**Persamaan:** persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak di peDesaan putus Sekolah

**Perbedaan:** perbedaan tersebut terletak dalam kajian penelitiannya. Dimana kalau penelitian ini hanya fokus pada faktor penyebab anak putus Sekolah saja tanpa membahas lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus Sekolah. Sedangkan penelitian saya bukan hanya pada faktor penyebab anak putus Sekolah saja, melainkan bagaimanakah pemerintah daerah pada khususnya membuat suatu kebijakan yang bisa





Permasalahan pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/ pendidikan. Dengan dasar inilah pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara tanpa ada diskriminasi.

2. Masalah daya tampung pendidikan

Permasalahan daya tampung pendidikan juga dialami bangsa Indonesia yaitu ketika sejak tahun 1960-an terjadi *baby boom* yang masalahnya baru dirasakan pada tahun 1970-an, bahkan sampai sekarang. Masalah daya tampung adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimangi dengan ketersediannya jumlah sekolah yang ada. Sehingga tidak semua anak usia sekolah ditampung untuk masuk sekolah.

3. Masalah relevansi pendidikan

Permasalahan relevansi pendidikan dirasakan bangsa Indonesia ketika terjadi ketidakcocokan antara isi pendidikan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini dapat ditandai dengan rendahnya lulusan sekolah (*rate of return*). Hal ini berimbas pada adaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Alhasil, banyak lulusan sekolah yang tidak dapat diserap oleh dunia kerja.

4. Masalah kualitas pendidikan,



Permasalahan kualitas pendidikan juga tidak kalah sulitnya dibandingkan dengan masalah yang disebutkan sebelumnya. Indikator paling nyata dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya perolehan hasil ujian belajar siswa. Beberapa penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan perolehan Nilai Evaluasi Murni (NEM) siswa untuk semua jenjang sekolah masih tergolong rendah.<sup>14</sup>

#### 5. Masalah efisiensi dan efektifitas pendidikan.<sup>15</sup>

Permasalahan efisiensi dan efektifitas pendidikan merupakan suatu masalah yang memiliki suatu cakupan yang sangat luas. Efisiensi pendidikan adalah tercapainya maksimalisasi tujuan pendidikan dengan pengorbanan yang minimal. Sedangkan efektifitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan secara baik dan memadai. Dengan demikian apabila suatu pendidikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif, berarti tujuan pendidikan dapat dicapai dengan bagus dan terlaksana tanpa adanya pengorbanan.

Secara teoretik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Sebelum merumuskan kebijakan pendidikan, maka seorang perumus

<sup>14</sup> Ace Suryadi dan HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Bandung: Rosda Karya, 1994), 31

<sup>15</sup> Suryati Sidharto, *Pembaharuan Pendidikan dan Latar Belakangnya*, dalam Dirto Hadisusanto, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1995), 202.



Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka segala hal yang berhubungan dengan manajemen pendidikan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh tingkat daerah sampai kepada masyarakat. Bila dirinci, kewenangan di bidang pendidikan ini dapat mencakup mulai dari kewenangan merumuskan atau membuat kebijakan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijaksanaan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan nasional tersebut. Meski begitu, tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijaksanaan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, taksonomi ilmu yang dikembangkan dan diajarkan dalam jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien, dan tepat jika tidak didesentralisasikan barangkali masih dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan kewenangan implementasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam hal-hal tertentu yang spesifikasinya memerlukan penanganan khusus, pemerintah pusat masih berwenang melaksanakan sendiri. Demikian pula hal-hal yang bertalian dengan evaluasi kebijaksanaan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan bisa pula diserahkan atau didesentralisasikan ke unit bawah, di daerah atau kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijaksanaan dan yang berdimensi daerah atau lokal serta pelaksanaan dan evaluasinya



Sehingga tidak ada lagi ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berada di pusat (ibu kota negara).

Implementasi pendidikan merupakan suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan pendidikan.<sup>19</sup> Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan pendidikan boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik.

Menurut pandangan ahli-ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit dan komlek dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/ organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implentasi pendidikan tersebut.<sup>20</sup>

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam proses implementasi, yaitu: faktor yang terletak pada rumusan

---

<sup>19</sup> Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 6.

<sup>20</sup> Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 105.









mempertahankan fungsionalisme hingga lebih dari dua setengah abad sejak ia mempublikasikan *The Structure of Social Action* pada tahun 1937. Dalam karyanya ini Parson membangun teori sosiologinya melalui “*analytical realism*”, maksudnya adalah teori sosiologi harus menggunakan konsep-konsep tertentu yang memadai dalam melingkupi dunia luar. Konsep-konsep ini tidak bertanggungjawab pada fenomena konkrit, tapi kepada elemen-elemen di dalamnya yang secara analitis dapat dipisahkan dari elemen-elemen lainnya. Oleh karenanya, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang diringkas dari kenyataan empiric, tentunya dengan segala keanekaragaman dan kebingungan-kebingungan yang menyertainya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena yang melekat erat pada hubungan kompleks yang membangun realita sosial. Keunikan realism analitik Parson ini terletak pada penekanan tentang bagaimana konsep abstrak ini dipakai dalam analisis sosiologi. Sehingga yang di dapat adalah organisasi konsep dalam bentuk sistem analisis yang mencakup persoalan dunia tanpa terganggu oleh detail empiris.

Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGILnya yang terkenal. Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni *Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency*. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Dalam karya berikutnya, *The Social System*, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat beberapa macam motivasi, antara lain kognitif, chatectic, dan evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab

terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai *modes of orientation*. Unit tindakan oleh karena melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor.

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain

Talcott Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut AGIL, AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *latency (pattern maintenance)* (L).

Demi kelangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- a. Adaptasi (*adaftation*): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.

- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskan itu.
- c. Integrasi (*integration*): masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
- d. Latensi (*Latency*) atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motifasi-motifasi itu.<sup>26</sup>

Anggapan yang mendasari pemikiran Talcot Parson ini yaitu:<sup>27</sup>

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai sebuah system daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain
- b. Hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut adalah bersifat timbal balik
- c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental system sosial selalu cenderung ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis dalam menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar

<sup>26</sup> George Ritzer, dkk. *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 256

<sup>27</sup> I.B. Irawan. *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: kencana prenda media group, 2013), 53-54.

- d. Sekalipun disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi.
- e. Perubahan-perubahan di dalam system sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi.
- f. Pada dasarnya perubahan sosial timbul dan terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yaitu:
  - 1.) Penyesuaian yang dilakukan oleh system sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar
  - 2.) Pertumbuhan melalui proses diferensiasi structural dan fungsional
  - 3.) Penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
- g. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu system sosial adalah consensus di antara para anggota masyarakat mengenai masyarakat-masyarakat tertentu.

Teori structural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/ masyarakat. Persoalan mendasar yang dihadapi setiap organism sosial adalah bagaimana agar

tetap dapat bertahan dan pola interaksi antar subsistem yang terjadi di dalamnya dapat mempertahankan keutuhan system tersebut.<sup>28</sup>

Jika Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini dikaitkan dengan teori fungsionalisme structural karya Talcot Parson ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam menanggulangi putus Sekolah pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan harus mampu bekerja sama yang baik dengan pemerintah Kecamatan larangan dan juga tidak lepas pula mengikutsertakan jajaran pemerintahan Desa Larangan khususnya masyarakat Desa larangan agar tujuan awal (*goal attainment*) yang dalam hal ini menanggulangi anak putus Sekolah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan jika ada salah satu struktur masyarakat yang tidak berintegrasi (*Integration*) dengan baik maka tujuan untuk menanggulangi anak putus Sekolah akan gagal atau tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>28</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 20















Tabel 3.1

## Nama-nama informan

| No | Nama  | Jabatan  | Data yang ingin dicari  |
|----|---|--|---|
| 1  | Moh. Tarsun M.Si  | Kepala Dinas<br>Kabupaten<br>Pamekasan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas pendidikan di pamekasan</li> <li>b. Filosofi pamekasan sebagai kota pendidikan</li> <li>c. Jumlah anak putus sekolah</li> <li>d. Program penanggulangan anak putus sekolah</li> <li>e. Implementasi program</li> </ul>                                       |
| 2  | Amirus Saleh,<br>SH,M.Psi   | Kepala Kecamatan<br>Larangan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi pendidikan di Larangan Luar</li> <li>b. Program penanggulangan anak putus sekolah</li> <li>c. Data statistic larangan Luar (data BPS)</li> </ul>  |
| 3  | Moh. Ali Ghufran SH.  | Kepala Desa<br>Larangan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi demografis dan geografis Desa</li> <li>b. Kondisi pendidikan</li> <li>c. Kuantitas anak putus sekolah di Desa</li> <li>d. Faktor penyebab anak putus sekolah</li> <li>e. Program penanggulangan anak putus sekolah</li> <li>f. Efektifitas program</li> </ul> |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zaini,</li> <li>b. zainul,</li> <li>c. rendi,</li> <li>d. heri,</li> <li>e. Dina</li> <li>f. tatia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PNS</li> <li>b. Pengusaha</li> <li>c. Dokter spesialis umum</li> <li>d. Kepala sekolah</li> <li>e. Guru sertifikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perspektif terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi nak putus sekolah</li> <li>b. Saran terhadap program pemerintah</li> <li>c. Cara memperthankan anak agar tidak putus sekolah</li> </ul>  |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruroh</li> <li>b. Surah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petani</li> <li>b. petani</li> </ul>   |   |

|   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
|   | c. Ta'in<br>d. Ahmad   | c. petani<br>d. pedagang sayur |   |
| 6 | a. Azizah<br>b. Hidayati<br>c. Umar<br>d. Rahmat<br>e. Ghufron | Anak putus sekolah             | a. alasan putus sekolah<br>b. pandangan tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah<br>c. keinginan untuk melanjutkan sekolah |

**Keterangan:** nama-nama masyarakat larangan Luar baik yang kaya ataupun yang miskin telah peneliti tulis dalam nama samaran untuk menjaga privasi narasumber.

#### D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian tentunya ada tahapan-tahapan penelitian yang mana untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

##### a. Melihat Fenomena

Melihat kehidupan masyarakat Desa Larangan Luar. Langkah ini mempunyai tujuan untuk membuktikan, merumuskan masalah, menentukan setting, dan juga subjek penelitian yang hendak di teliti mengenai objek penelitian. Melihat fenomena tidak hanya dimaknai dengan melihat dengan panca indera mata pada waktu itu, tetapi juga dari berbagai macam cerita yang telah dialami oleh masyarakat Desa Larangan Luar. Yaitu tentang bagaimana kehidupan pendidikan masyarakat.

b. Melakukan penulisan proposal

Langkah selanjutnya adalah menulis proposal penelitian. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang rencana kegiatan penelitian di Desa Larangan Luar secara lengkap, jelas, singkat, dan mudah dimengerti sebagai pertimbangan bagi pihak yang memberikan persetujuan atas kegiatan penelitian yang diusulkan. Proposal sudah diujikan bulan Oktober 2017 dan dinyatakan lulus dan melanjutkan pada tahap penulisan skripsi.

c. Pengumpulan data dan melakukan penelitian

Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data dari berbagai referensi, yaitu buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul permasalahan mengenai Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di DEsa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Peneliti mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, perpustakaan Prodi Sosiologi FISIP UINSA, dan membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan penelitian. Langkah ini merupakan inti dari kegiatan penelitian yang dilakukan, yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, dan menganalisa data yang telah diperoleh dari tujuan lapangan untuk penelitian. Peneliti melakukan wawancara sekaligus dokumentasi yang dimulai pada tanggal 01 November-31 Desember 2017. peneliti tidak setiap

hari melakukan penelian pada tanggal tersebut, tetapi pada hari atau tanggal yang sudah ditentukan oleh peneliti.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Metode observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melihat fenomena berdasarkan kenyataan di lapangan.<sup>37</sup>

Dalam pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara terus-menerus sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang diteliti, peneliti membutuhkan suatu pendengaran yang tajam dan daya ingat yang tinggi agar hasilnya bisa sempurna. Teknik pengumpulan data yang utama dan dimanfaatkan sebesar-besarnya artinya penelitian ini terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sedang digunakan sebagai sumber data

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 124.

penelitian. Dalam pelaksanaan observasi peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melibatkan diri langsung pada subyek.<sup>38</sup>

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat langsung keadaan lokasi Desa Larangan Luar serta Melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat setempat. Pengamatan ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data secara detail dan valid.

## 2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan peneliti dengan cara betatap muka dengan informan untuk mendapatkan beberapa informasi melalui tanya jawab, untuk memperoleh keterangan dan tujuan penelitian.<sup>39</sup>

Dalam pengumpulan data dengan wawancara atau interview, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data dengan dialog tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.<sup>40</sup>

Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan

---

<sup>38</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2006), 61

<sup>39</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

<sup>40</sup>Djumhur dan M. Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu, 2000), 50.



Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diantaranya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan masyarakat Desa Larangan Luar.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>41</sup>

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data-data riil yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah seperti data yang di dapat dari dokumentasi program-program penanggulangan anak putus sekolah.

## F. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data peneliti akan menggunakan beberapa proses dalam analisis data yaitu:<sup>42</sup>

### 1. Reduksi Data

Sugiyono mengatakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu”.

<sup>41</sup>Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 70.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2008), 337-341.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dalam penyajian data penelitian ini, peneliti memilih menggunakan uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Sugiyono mengatakan bahwa: Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak, karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

#### G. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta actual di lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam teknik pemeriksaan keabsahan data:

##### a. Memperpanjang waktu penelitian.

Dengan memperpanjang waktu penelitian ini, peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan wawancara dan pengamatan. Melalui perpanjangan waktu ini pengamatan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai. Dengan demikian dapat ditemukan informasi yang jelas dan tidak ada yang ditutupi lagi, selain itu dapat memperbanyak data dan orang yang akan diwawancarai.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaan akan lebih banyak mempelajari ketidakbenaran informasi, baik yang datang dari responden maupun dari diri individu. Dengan demikian, penting sekali akan adanya perpanjangan keikutsertaan

peneliti guna berorientasi dengan situasi, juga guna untuk memastikan apakah konteks tersebut sudah dipahami atau tidak.<sup>43</sup>

b. Triangulasi

Triangulasi adalah cara memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain serta memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan kebenaran data.<sup>44</sup>

Dengan mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai penelitian di lapangan. Dengan membandingkan pengamatan pertama dan pengamatan kedua dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Berikut cara memperoleh triangulasi melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dan dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat orang biasa
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

<sup>43</sup> Lexi. J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2013), 327

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Method"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 330



oleh Bupati Drs. H. Ach. Syafii Yasin, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Kholil Asy'ari. Pada tahun 2016 Kab. Pamekasan memperingati hari jadinya yang Ke-486 pada tanggal 3 November bertepatan dengan penobatan raja islam pertama yakni Ronggosukowati.

Gambar 4.1

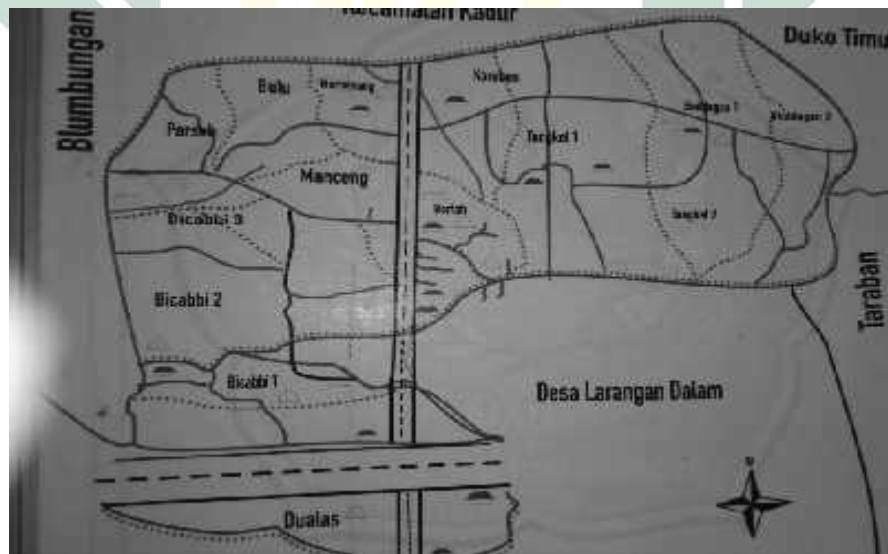
Peta kabupaten pamekasan



Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten ini adalah Kecamatan Larangan. Kecamatan Larangan ini terdiri dari beberapa desa diantaranya Desa Larangan Luar. Desa Larangan luar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah 6.220.300 m. Desa larangan ini terletak berbatasan dengan Desa Kadur sebelah utara, sebelah Timur berbatasan dengan desa Duko, sebelah selatan dengan desa Larangan Dalam, dan sebelah barat dengan desa Blumbungan.

Gambar 4.2

Peta Desa Larangan Luar



Sumber: Dokumentasi Desa Larangan Luar





5. Perkuburan : 2.400 Ha

e. Orbitasi (jarak pemerintahan)

Tabel 4.3

Jarak kantor desa ke fasilitas (Km) di Kecamatan Larangan 2015

| Desa          | Kantor kecamatan | Kantor polisi setempat | Rumah sakit terdekat | Puskesmas terdekat |
|---------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Larangan Luar | 2.0              | 3.0                    | 12.0                 | 5.0                |

Sumber : Kantor kepala Desa Larangan Luar

f. Banyaknya Perangkat Desa Larangan Luar Menurut yaitu 14 Kepala Dusun, 1 Modin, dan 9 anggota BPD

Tabel 4.4

Nama Kepala Desa, sekretaris desa dan ketua BPD di Kecamatan Larangan

| Desa          | Nama                 |                 |              |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
|               | Kepala Desa          | Sekretaris Desa | Ketua BPD    |
| Larangan Luar | Moh. Ali Ghufron, SH | Ah. Farisi      | Moh. Qudsi G |

Sumber: Kantor Kecamatan Larangan

Perincian Struktur Organisasi pemerintahan Desa Larangan Luar yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

Kepala Desa : Moh. Ali Ghufron, SH

Sekretaris Desa : Ah. Farisi, S.Ag

<sup>45</sup> Data Desa Larangan Luar 2015





sehari-harinya baik kebutuhan primer ataupun sekunder masyarakat bekerja sesuai kemampuan atau keahlian yang mereka miliki.

Seiring dengan perkembangan zaman, Sumber daya manusia (SDM) di desa Larangan-luar dipandang bukan hanya sebagai sumber daya semata, melainkan merupakan modal atau aset bagi institusi dan organisasi yang ada di masyarakat. Di desa Larangan-luar sendiri ada beberapa orang yang telah mengembangkan potensi masyarakatnya untuk meningkatkan ekonomi lokal. Contohnya, di Dusun Bertah terdapat usaha pembuatan Kripik Pisang, jenis makanan yang bahan utamanya terbuat dari Pisang. Usaha tersebut telah memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Contoh lain, di dusun Morpenang terdapat usaha kripik singkong yang bahn utamanya dari singkong. Usaha tersebut juga telah berjalan baik dan mampu memberdayakan masyarakatnya sebagai buruh tani.

Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai peternak ayam dan itu juga dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Larangan-luar yang masih belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Selain petani dan PNS, ada juga yang berdagang, kemudian berternak, karena hampir setiap rumah memiliki hewan ternak, seperti sapi, kambing serta ternak Ayam. Budidaya ayam di desa Larangan Luar cukup banyak, ada dua

ayam yang ditenak yaitu ayam pedaging dan ayam petelur, akan tetapi yang dominan adalah ayam pedaging. Selain itu, ada yang bekerja sebagai pengayuh becak dan pengendara becak motor, serta memiliki usaha membuka bengkel.

Dari ketiga contoh di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Larangan-luar telah berperan efektif sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang dapat mengelola diri sendiri juga orang lain. Pengelolaan ini tentunya memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan potensi alam sekitar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Larangan-luar pada umumnya.

Biasanya Keterampilan yang dimiliki masyarakat desa Larangan Luar adalah keterampilan turunan dari orang tuanya, jika orang tuanya tani, maka kemungkinan besar kemampuan anaknya juga tani, begitu juga jika orang tuanya pedagang maka anaknya ikut menjadi pedagang.

Bagi masyarakat Desa Larangan Luar, pertanian merupakan pekerjaan utama di samping pekerjaan lain seperti berdagang, wiraswasta, dan lain sebagainya. Pekerjaan petani tidak pernah tersisihkan, dengan demikian dapat digambarkan bahwa keberadaan ekonomi masyarakat Larangan masih rendah dan butuh perhatian dari pemerintah setempat.



Begitupun di Desa Larangan pendidikan diutamakan untuk meningkatkan masyarakat yang lebih unggul kedepannya. Akibat positif membaiknya sosial ekonomi masyarakat secara umum, kebutuhan akan pendidikan akan terpikirkan oleh masyarakat itu sendiri dengan baik. Di dalam masyarakat desa larangan luar kondisi itu nampaknya nyata sekali, dimana sosial pendidikan masyarakat desa bisa dikatakan cukup baik untuk ukuran desa. Hal ini terbukti dari adanya pemenuhan sarana pendidikan yang lumayan memadai baik yang bersifat formal atau non formal, yang berstatus Negeri maupun lembaga-lembaga swasta perorangan atau yayasan.

Untuk mengetahui lebih lanjut lembaga pendidikan yang ada di Desa Larangan Luar, tabel ini akan merinci lembaga-lembaga yang ada. Namun demikian terlebih dahulu dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Larangan Luar pada umumnya tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal saja untuk menambah pengetahuan yang diinginkan, terlebih lagi jenis pengetahuan religi yang memang masyarakat larangan luar sangat kental akan nilai-nilai keislamannya.

Secara keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di Desa Larangan Luar secara rinci dapat dilihat di tabel berikut:







masyarakat dan tokoh agama dalam menciptakan suasana kondusif dalam bingkai kehidupan rukun antar-umat beragama. Kerukunan umat beragama di Desa Larngan Luar ini ditandai dengan semangat toleransi yang tinggi, saling memahami, dan tenggang rasa antar-umat beragama. Kebijakan serta kedewasaan berpikir masyarakat dalam menanggapi segala perbedaan menjadi salah satu indikator terhadap tingginya toleransi antarumat beragama di kota ini. Setiap terjadi perselisihan atau hal-hal yang mengarah kepada perselisihan atau bahkan konflik, masyarakat menyelesaikannya secara arif dengan cara melibatkan masing-masing tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat desa larangan luar sudah mencerminkan kehidupan religious yang islami. Halini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap dan kehidupan yang telah berdasarkan pada etika islami sebagai tolak ukurnya meskipun hal ini hanya bersifat paling sederhana sekali. Ada beberapa contoh yang menjadi indikasi adanya statement tersebut, yakni dalam pergaulan masyarakat yang tidak terlalu bebas, bahkan sering terdengar istilah tidak boleh/ haram untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syari'at Islam.

Dari pengamatan sekilas, terciptanya kondisi yang demikian ternyata bukan terjadi secara kebetulan, akan tetapi demikian ada dan tercipta di lingkungan masyarakat yang majemuk ini atas dasar usaha

dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang sengaja ingin mewujudkan kondisi sosial religious secara Islami, mereka itu pada umumnya adalah tokoh masyarakat, alim ulama' maupun para kyai.

Bagi masyarakat desa Larangan luar tercipta adanya persepsi bahwa bagi seorang ulama' yang mempunyai charisma merupakan suatu keharusan untuk memuliakannya, dan keberadaan para tokoh ulama' yang demikian merupakan control sosial secara langsung atas perilaku masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan tokoh ulama' di lingkungan Desa Larangan Luar mempunyai andil yang sangat positif dalam menciptakan lingkungan yang agamis.

Secara keseluruhan masyarakat desa larangan luar beragama islam, maka dapat ditafsirkan bahwa kehidupan keagamaan islam secara moral akan membawa psikologis dalam kegiatan yang bernafaskan islam. Aliran keberagaman masyarakat pamekasan sangat beragam. Indikasinya bisa dilihat pada potret keberislaman warga larangan luar, ada yang menjadi warga Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan mungkin ada yang mempunyai aliran keagamaan tersendiri. Tetapi NU memang mendominasi secara kuantitas. Semuanya hidup rukun, paling tidak selama ini tidak ada konflik terbuka.

Diantara berbagai bentuk keagamaan masyarakat desa Larangan Luar ini sebagai berikut:





keluarga jenazah demi meringankan biaya yang akan berlangsung selama 7 hari sejak kematian. Kemudian diadakan tahlilan hingga tujuh hari, setelah itu ada hari yang di istimewa, seperti empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari. Setelah itu akan ada selamatan setiap tahunnya, biasanya orang menyebut "kholan". Biasanya warga desa Larangan Luar menjaga Makam yang baru meninggal tersebut dari hari pertama sampai hari ke 40. Karena masyarakat Larangan Luar mempunyai kepercayaan kalau gak dijaga kuatir akan di curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencari kekayaan dengan jalan pintas.

### 3. Pernikahan

Adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Larangan Luar, seperti acara pernikahan biasanya yang di tandai dengan kesakralan. Sebelum menuju pernikahan terdapat tahapan, yang diantaranya sebagai berikut: *pertama*, peminangan, tahap awal rangkaian untuk keluarga laki-laki datang untuk meminang si gadis yang ingin di lamar. *Kedua*, pertunangan yang biasanya orang Madura bilang *abekalan*. Biasanya dalam tahap pelamaran si cewek akan disertakan dengan buah Pinang yang tua atau yang masih muda, itu sebagai isyarat kepada yang di lamar. Kalau misalnya pinangnya yang dibawa pelamar masih muda berarti artinya nikahnya masih lama, dan sebaliknya kalau misalnya













Selain J alasan lain juga dikemukakan oleh G yang saat ini bekerja sebagai *Cleaning servis* di Tunjangan Plaza Surabaya akibat putus sekolah 3 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwasanya sekarang semuanya harus butuh uang. Walaupun ada bantuan dari pemerintah dalam bidang pendidikan, namun kebutuhan sehari-hari juga sangat membutuhkan uang.

“pendidikan itu walaupun dapat bantuan gak seberapa, dulu saya sekolah itu uang LKS masih bayar tiap semester kalau gak salah 4000an. Saya kan anak ke2 dan saya punya 3 adek. Ya sudah adek-adek saya aja nanti yang sekolah biar mereka pintar.”<sup>53</sup>

## **2. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.**

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat disampingkan, sebab pendidikan ini membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama yang diridhoi Allah Swt. Demikian pula halnya dengan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebab pendidikan agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang sifatnya vertikal yaitu hubungan manusiandan khaliknya maupun yang sifatnya horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya, itulah sebab pendidikan sangat penting dan merupakan kebutuhan yang sangat perlu bagi kehidupan seseorang.

---

<sup>53</sup> G, wawancara, pada tanggal 15 November di TP



angan-angan saja. Selain masalah yang terkait dengan anak-anak putus sekolah diatas, ternyata angka buta aksara di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi cerminan bahwa pendidikan kita masih terbelakang dan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain.

Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan maupun menyaipkan beasiswa bagi anak-anak putus sekolah sehingga hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan bisa terpenuhi secara layak, adil dan merata. Namun mungkin kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam pengentasan anak putus sekolah masih belum maksimal sehingga tujuan pendidikan nasional yang tecantum dalam pembukaan undang-undang dasar “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum bisa tercapai.

Masalah angka putus sekolah ini juga terjadi di Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Selain dikenal Kota Batik dan Gerbang Salam. Kabupaten Pamekasan juga dinobatkan sebagai Kabupaten Pendidikan dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Predikat Kabupaten Pamekasan sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh pada akhir tahun 2012 lalu, sejak saat itulah Kabupaten pamekasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi kabupaten Pendidikan. Angka putus sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timue



tengah, juga diperkuat dengan pendapat bapak Abdul muin selaku mantan kepala cabang dinas Larangan yang sekarang menjadi ketua STAI Al Khairat pamekasan.

“UPT Pendidikan itu sangat penting dalam rangka membantu perkembangan dan mutu pendidikan di Kecamatan .UPT yang memang merupakan kepanjangan tangan Disdik bisa mengawasi langsung berlangsungnya pendidikan di wilayah masing-masing. Terkait data anak putus sekolah di kecamatan larangan belum diketahui dengan pasti. Namun jika dilihat dari data mbak tadi yang mengatakan bahwa masih ada sekitar 1,46 anak yang putus sekolah, kecamatan larangan ini pasti masuk di dalamnya dikarenakan sekarang dalam sudut pandang saya sendiri di kecamatan larangan sudah bermunculan anak yang putus sekolah dan saya tidak bisa mengeneralkan faktornya apa Tapi yang paling mendasar itu karena ekonomi.”<sup>57</sup>

Melihat kondisi pendidikan yang masih menemukan angka anak putus sekolah sekitar 1,46% tersebut, pemerintah kabupaten pamekasan khususnya Dinas pendidikan kabupaten pamekasan melakukan berbagai bentuk penannggulan anak putus sekolah dengan mengembangkan dan mendukung program-program yang salah satu tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan agar anak putus sekolah bisa diminimalisirkan, misalnya dengan cara mengadakan sosialisasi pentingnya pendidikan dengan mengundang tokoh termuka dalam bidang pendidikan. Seperti yang telah dilakukan sekitar bulan agustus 2017 bertempat di hotel *front one* pamekasan Forum Alumni

---

<sup>57</sup> Abdul muin, wawancara, 31 Desember 2018 di Rumah





melanjutkan sekolah sangatlah tinggi, tapi kedua orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkaninya. Rian hidup bersama dengan kakak dan ayahnya yang hanya pekerja serabutan, sementara Ibunya bekerja di Malaysia. waktu hari Rabu malam saya di hubungi Wiwin salah seorang relawan. Dia bilang bahwa ada anak yang putus sekolah dan langsung saya suruh bawa ke kantor keesokan harinya, Saya melihat semangat anak ini tinggi sekali untuk sekolah, maka dari itu saya langsung menghubungi Kepala Sekolah SMP 06 Kabupaten Pamekasan Ahmad Halili M.Pd.I dan Alhamdulillah Beliau merespon dan menerima dengan baik. untuk seragam Rian pihak sekolah yang akan membantu. Sementara untuk kebutuhan yang lain seperti tas, sepatu, perlengkapan alat tulis, sepeda, dan uang saku juga biaya hidup Rian, saya yang menanggung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wiwin dan menghimbau kepada semua teman- teman Wartawan, Media, LSM dan bahkan Masyarakat luas, jika ada atau menemukan Anak yang sama nasibnya seperti Rian sesegera mungkin melaporkan ke Dinas Pendidikan. Itu tidak terbatas berapapun jumlah anak yang putus sekolah kami akan bantu.<sup>59</sup>

Dalam merealisasikan program penanggulangan anak putus sekolah di Pamekasan pada umumnya, Pemerintah daerah sudah pasti memerlukan biaya yang banyak demi mensukseskan program tersebut. Karena tanpa biaya pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

“Pemerintah daerah ini hanya mendanai pendidikan wajib belajar 9 tahun yakni sampai lulus SMP/Mts, Sedangkan untuk MA/SMA sudah bukan tanggungan daerah lagi. dana ini berasal dari pemerintah yang berupa BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang masuk ke daerah dengan nama BOSDA yang bentuknya ada yang tersalurkan melalui Program Indonesia Pintar (KIP). Indikator anak yang menerima bantuan KIP ini didasarkan pada data sensus Dinas sosial yang di dapat dari data-data desa atau Kecamatan, selain itu di Sekolah biasanya ada siswa yang mendapatkan Bantuan Siswa

---

<sup>59</sup> Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan



seringkali terjadinya anak putus sekolah karena sudah tidak adanya motivasi dan semangat belajar dalam diri sang anak, sehingga walaupun misalnya dijangkau oleh pemerintah dengan memperoleh bantuan, maka semua itu hanya sia-sia belaka jikalau dari belakang tidak ada dorongan maka kurang baik juga.”<sup>62</sup>

3. Perspektif masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah pengharapan, peninjauan atau tinjauan pandangan luas tentang suatu objek.<sup>63</sup> Jadi, Perspektif Masyarakat adalah setiap penilaian, peninjauan atau pandangan pandangan luas dari masyarakat terhadap suatu objek atau masalah.

Ketika berbicara mengenai perspektif kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masyarakat larangan bisa dikatakan bahwanya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus sekolah belum maksimal dan kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan menurut sebagian masyarakat yang ada di Desa Larangan Luar khususnya dalam penerimaan bantuan pendidikan adakalanya yang benar-benar membutuhkan belum terjangkau.

*“mon tang anak yeh pakkun asakolah reyah make tak andik kartu, taoh yeh mak tang anak lema mikki’ adek se olleah kartu keng enjek alhamdulillah asakolah kappi make majelen otang. Polan reng toah reh takok andik otang ka nak poton mon tak epasakolah, reng toah reh kun abiayaanah se penting nak kanaan kenceng ben semangat.*

<sup>62</sup> Amirus Saleh , wawancara, kepala camat Larangan bapak pada tanggal 7 desember di kantor kecamatan

<sup>63</sup> KBBI/web/perspektif

*Makeh bedeh bentoan BSM can, tang anak M, kun olle sakonek cek polan e begi rata.” Mon kun adentos bentoan pamrenta taker bileh, keng enjek tang anak la sarjana se 3, se 2 kek asakolah kappi.”*

“kalau anak saya tetap sekolah walaupun gak punya kartu, gak tahu ya walau naka saya sudah lima yang sekolah gak ada yang yang bantuan berupa kartu sama sekali, tapi gak apa-apa Alhamdulillah anak saya semuanya sekolah walaupun dengan berhutang, karena sebagai orang tua takut punta hutang kepada anak-anaknya kalau tidak disekolahkan. Sebagai orang tua ini hanya bisa memberikan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang penting anaknya masih semangat untuk sekolah. walau ada bantuan BSM katanya di sekolah M ini, dia Cuma dapat sedikit soalnya di sekolahnya M ini dibagi rata. Kalau hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah mau sampai kapan, tapi gak apa-apa anak saya yang 3 sudah sarjana semua kalau yang 2 masih sekolah.”<sup>64</sup>

Kurangnya sikap dan tindak tegas dari pemerintah khususnya dalam penanggulangan anak putus sekolah ini juga dirasakan oleh mahasiswa aktifis PMII Pamekasan yang merasa bahwa selama ini pemerintah khususnya dalam pendidikan belum sepenuhnya berhasil bahkan menurutnya belum ada program yang memuaskan dan walaupun ada belum sepenuhnya merata.

“Selama pak Tarsun menjabat Plt Kepala Disdik Pamekasan dinilai kurang produktif. Tidak ada terobosan baru yang ia ciptakan. Akibatnya pendidikan di Bumi Gerbang Salam tidak maju-maju. Padahal, menjabat Plt relatif lama. Menurut saya dari ketiga figur yang lolos verifikasi, Bapak Tarsun tidak layak menjabat sebagai kepala Disdik Pamekasan. Buktinya selama dia menjabat Plt tidak ada perkembangan apa-apa,. Disdik Pamekasan butuh sosok baru. Sosok yang inovatif, profesional, pekerja keras, dan mampu mengelola pendidikan dengan baik.”<sup>65</sup>

<sup>64</sup> M, wawancara, pada hari jumat 1 desember 2017 di rumah

<sup>65</sup> Mufiqul Khairot , wawancara, pada tanggal 20 November 2017 dengan di rumah





Masalah yang dihadapi masing-masing suatu bangsa sangat beragam dengan bobot kesulitan yang beragam pula. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia juga menghadapi masalah dalam bidang pendidikan. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini mencakup lima pokok masalah, yaitu:

1. Masalah pemerataan pendidikan,
2. Masalah daya tampung pendidikan,
3. Masalah relevansi pendidikan,
4. Masalah kualitas pendidikan, dan
5. Masalah efisiensi dan efektifitas pendidikan.<sup>70</sup>

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar teknologi yang semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai

---

<sup>70</sup> Suryati Sidharto, *Pembaharuan Pendidikan dan Latar Belakangnya*, dalam Dirto Hadisusanto, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1995), 202.



jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah seperti diantaranya keterbatasan adanya pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya niat seseorang individu untuk mengenyam pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau daerah tertinggal dan selain itu karena adanya faktor lingkungan (pergaulan). Selain itu yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah dan lain-lain.

Putus Sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga, dan lain-lain. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diperoleh secara formal di sekolah, secara informal melalui keluarga. Khususnya pendidikan formal tidak semua anak mendapatkan haknya karena kondisi-kondisi yang memungkinkan orang tuanya tidak dapat memenuhinya. Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor

yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajib sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah. Namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah. Meskipun dasar hukum untuk peningkatan pendidikan sangat kuat, namun pendidikan masih merupakan persoalan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jadi bagaimana sekarang sikap pemerintah dan masyarakat harus dapat menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak mengenyam pendidikan formal akan dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Hal ini harus menjadi pusat perhatian oleh para pemerintah sebagai peranya dalam pengentasan anak putus sekolah, agar permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat terpecahkan sehingga angka putus sekolah menurun bahkan seluruh anak dapat mengenyam pendidikan.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masa anak-anak merupakan tahapan penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian di kemudian hari. Masa untuk berkeaktifitas secara konkrit, di mana anak-anak mengembangkan kemampuan menganalisa dan mengelola pola relasi sosial dalam hubungannya dengan kemampuan memecahkan berbagai jenis masalah yang dihadapi. Kemampuan tersebut akan berguna bagi hidupnya di kemudian hari. Masalah anak putus sekolah ini juga terjadi di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan data yang ada bahwa untuk saat ini angka partisipasi sekolah anak umur 7-12 pada jenjang SD/ yang sederajat yaitu 100%, artinya untuk SD di kabupaten pamekasan ini tidak ada yang putus sekolah atau semuanya sekolah. sedangkan untuk umur 13-15 tahun pada jenjang SMP/ yang sederajat ini angka partisipasi sekolah mencapai 98,6%. Hal ini berarti anak yang putus sekolah pada jenjang ini sekitar 1,46% yang kebanyakan berasal dari wilayah utara dan tengah. Di dasarkan pada peta wilayah kabupaten pamekasan, Kecamatan larangan merupakan salah satu kecamatan yang ada di bagian tengah. Hal ini didukung dengan data angka partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Tabel

Jumlah tingkat pendidikan masyarakat Desa Larangan Luar

| NO     | Pendidikan | Jumlah |
|--------|------------|--------|
| 1      | TK/RA      | 917    |
| 2      | MI         | 5125   |
| 3      | SD         | 3190   |
| 4      | SMP        | 502    |
| 5      | MTs        | 709    |
| 6      | MA         | 206    |
| 7      | SMA        | 398    |
| 8      | D1-D3      | 26     |
| 9      | Sarjana    | 103    |
| JUMLAH |            | 11176  |

Sumber: Data desa Larangan Luar

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi masalah putus sekolah anak MTs/SMP, dikarenakan angka partisipasi SMP/MTs lebih sedikit dibandingkan dengan angka partisipasi SD/MI. Seringkali anak yang putus sekolah di Desa Larangan ini, masalah anak putus sekolah ini menimpa anak dari keluarga miskin dan belum ditemukan oleh peneliti anak putus sekolah di kalangan kaum elite (Kaya). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemui beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah untuk tingkat MTs/SMP, diantaranya sebagai berikut:

1. Menikah di usia muda baik karena keinginan sendiri atau desakan dari orang tua
2. Minimnya pendapatan keluarga sehingga biaya menjadi penghalang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya

3. Merantau karena tuntutan ekonomi baik di dalam atau di luar kota bahkan ada yang sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pemerkasan tidak lepas dari kajian teoritiknya yaitu Teori Fungsionalisme structural karya Talcot Parson. Teori structural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/ masyarakat. Persoalan mendasar yang dihadapi setiap organism sosial adalah bagaimana agar tetap dapat bertahan dan pola interaksi antar subsistem yang terjadi di dalamnya dapat mempertahankan keutuhan system tersebut.<sup>71</sup>

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain

---

<sup>71</sup> Sindung Haryanto, *Spektum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 20

Demi kelangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Talcott Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut AGIL, AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *latency (pattern maintenance)* (L).

Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGILnya yang terkenal. Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, *Latency*. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Dalam karya berikutnya, *The Social System*, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat beberapa macam motivasi, antara lain kognitif, chatectic, dan evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai *modes of orientation*. Unit tindakan olehkarena melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor.

ketika kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah dikaitkan dengan teori fungsionalisme Struktural oleh Talcot Parson, maka tercipta skema sebagai berikut:



- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskan itu.

Tujuan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu penanggulangan anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan larangan Kabupaten pamekasan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini pemerintah sebagai pemilik otoritas harus berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Usaha ini diaplikasikan dengan berbagai program misalnya dengan pemberian BSM dan KIP bagi mereka yang perekonomiannya rendah. Selain itu dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan kepada masyarakat kabupaten pamekasan dengan kemasam yang menarik, misalnya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dengan menghadirkan narasumber yang handal yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi saat acara temu alumni mahasiswa Pamekasan-Jogja agar bisa memotivasi masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi arti pentinnya pendidikan bagi generasi bangsa.

- c. Integrasi (*integration*): masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.

Seperti halnya dengan penanggulangan anak putus sekolah di Desa Larangan Luar ini, pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan kabupaten pamekasan harus bisa berintegrasi dengan baik





Jika Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini dikaitkan dengan teori fungsionalisme structural karya Talcot Parson ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam menanggulangi putus Sekolah pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan harus mampu bekerja sama yang baik dengan pemerintah Kecamatan larangan dan juga tidak lepas pula mengikutsertakan jajaran pemerintahan Desa Larangan khususnya masyarakat Desa larangan agar tujuan awal (*goal attainment*) yang dalam hal ini menanggulangi anak putus Sekolah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan jika ada salah satu struktur masyarakat yang tidak berintegrasi (*Integration*) dengan baik maka tujuan untuk menanggulangi anak putus Sekolah akan gagal atau tidak berjalan dengan baik.







## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu. Narbuko *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Ahmadi, Abu.dkk., *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Budi Santoso, Tri Wibowo. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Bungin, Burhan . *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001 .
- Bungin, M. Burhan . *Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Djumhur dan M. Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu. 2000.
- Eko Susilo, Madya. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Semarang: Effhar Offset. 1993.
- H. Gunawan, Ary. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- Haryanto, Sindung . *Spektum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Henne,Aimee .dkk. *Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik*. Bandung : PT Refika Aditama. 2010.
- <http://E:/putus/Koran Madura » Blog Archive » Angka Putus Sekolah Harus Ditekan.htm>. diakses pada tanggal 08 April 2017.
- Imron, Ali. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, Dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

- Irawan, I.B. *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: kencana prenada media group. 2013.
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya. 2013.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 8 Oktober 2017, <http://kbbi.web.id/Anak>.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Pekanbaru: PT. Raja Grafindo. 2015.
- Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Ritzer, George. dkk. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana. 2014.
- Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012.
- Sidharto, Suryati. *Pembaharuan Pendidikan dan Latar Belakangnya*, dalam Dirto Hadisusanto, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta. 1995.
- Soimin,dkk. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing. 2014.
- Strauss, Alselm. & Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV. Alvabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Method"*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alvabeta, 2010.

- Suhartono, Irwan *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.
- Sumaryadi, Nyoman *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Suryadi, Ace. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya. 1994.
- Sutinah & Emy Susanti, *Laporan Penelitian Dosen Muda* (Surabaya: Lembaga Penelitian Dosen Muda. 2001.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K . “Pemerintah Dorong Anak Putus Sekolah Lanjut Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar”. Diakses pada 09 Oktober 2017. [http:// putus sekolah/ - Artikel.html](http://putus.sekolah/-Artikel.html).
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
- W.Creswell, John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi Ketiga. 2009.